



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310  
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

---

Nomor : B-13451/P.01/DL.03.01/07/2023 Jakarta, 18 Juli 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Lima berkas  
Hal : Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan  
Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Kementerian/Lembaga
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-06347/P.01/DL.03.01/03/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penawaran Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama, bersama ini disampaikan bahwa Staf Saudara, sebagaimana daftar terlampir, telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama akan dilaksanakan secara daring pada 7 Agustus hingga 22 September 2023 oleh *Research Centre for Conflict and Policy (RCCP)*, Universitas Brawijaya.
2. Selama pelaksanaan Program Pelatihan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tersebut, peserta diwajibkan untuk selalu menyalakan video selama proses pelatihan berlangsung dengan tingkat kehadiran minimal 90 persen. Satu sesi = 2 jam pelajaran (jampel), dengan masing-masing jampel berdurasi 45 menit
3. Pemberian sertifikat kelulusan kepada peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a). Memenuhi tingkat kehadiran sebagaimana disebutkan pada poin 2; b). Memenuhi nilai minimum evaluasi pembelajaran (kuis, *post-test*, presentasi, penugasan lainnya baik secara individu maupun berkelompok), serta telah mengisi seluruh kuesioner dari Pusbindiklatren dan penyelenggara pelatihan; dan c). Mengikuti seluruh program pelatihan dengan baik dan dinyatakan memenuhi minimum kehadiran yang ditentukan. Dalam hal peserta gagal memenuhi persyaratan dalam poin a dan b, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan
4. Pembiayaan Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 melalui mekanisme *cost sharing*. Pusbindiklatren menanggung *tuition fee*, tunjangan paket data dan komunikasi, biaya bahan, biaya sewa ruang meeting virtual serta biaya pengawas sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pelatihan Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan Instansi asal peserta menanggung biaya lain yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren untuk menunjang pelaksanaan pelatihan.
5. Seluruh...

5. Seluruh calon peserta diwajibkan untuk mengunggah Surat Tugas dan Surat Pernyataan Kesediaan (format terlampir), **selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juli 2023** melalui <http://sipena.bappenas.go.id>. Informasi panduan penggunaan aplikasi SIPENA dapat diakses melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/panduan-aplikasi-sipena>.
6. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menyampaikan informasi dan menerbitkan Surat Tugas untuk yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut perihal pelaksanaan pelatihan, dapat menghubungi Sdr. Naila Sukma Aisyah melalui email [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id) atau Sdr. Cika (CP RCCP UB) di nomor 081654964111

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan  
dan Pelatihan Perencana,



**Wignyo Adiyoso**

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Kepala *Research Centre for Conflict and Policy* (RCCP), Universitas Brawijaya;
3. PPK Program PPN X, Kementerian PPN/Bappenas.

Lampiran 1 : Daftar Tujuan  
Nomor : B-13451/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

#### DAFTAR TUJUAN

1. Badan Siber dan Sandi Negara
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
5. Kementerian Perhubungan
6. Kementerian Sosial
7. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur
8. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
9. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
10. Pemerintah Kabupaten Tulungagung
11. Pemerintah Kota Bima
12. Pemerintah Kota Mojokerto

Lampiran 2 : Hak dan Kewajiban Peserta  
Nomor : B-13451/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

## **HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA**

Kewajiban dan tugas dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan dokumen pendukung pertanggungjawaban pengeluaran (jika dibutuhkan);
- b. menyiapkan alat pendukung untuk mengikuti pelaksanaan pelatihan;
- c. mengikuti seluruh rangkaian agenda pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan ketentuan;
- d. mengikuti pelatihan dengan minimal tingkat kehadiran sesuai ketentuan, yakni minimal 90 persen dari jumlah jam pelajaran;
- e. dalam hal berhalangan atau perlu meninggalkan kegiatan pelatihan karena kepentingan pribadi yang mendesak, peserta wajib mendapatkan izin dari pelaksana pelatihan;
- f. menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren apabila tidak mengikuti ketentuan yang berlaku selama pelatihan;
- g. mengisi kuesioner pelaksanaan pelatihan yang ditentukan oleh Pusbindiklatren;
- h. menyampaikan/mengunggah surat tugas dan surat kesediaan mengikuti pelatihan (Lampiran 4);

Adapun hak dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelatihan sesuai kurikulum;
- b. mendapatkan bahan pelatihan;
- c. mendapatkan akun dan akses ke dalam Sipena;
- d. mendapat dokumen kelulusan/penyelesaian pelatihan sesuai dengan ketentuan tiap-tiap pelatihan

Lampiran 3 : Hak dan Kewajiban Instansi  
Nomor : B-13451/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

### **HAK DAN KEWAJIBAN INSTANSI PESERTA PELATIHAN**

Kewajiban dan tugas dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan kelengkapan dokumen administrasi pelatihan yang disyaratkan Pusbindiklatren dan atau pelaksana pelatihan; serta
- b. memberikan dukungan pembiayaan (*co-funding*) sesuai dengan kebutuhan dengan merujuk kepada Surat Edaran (SE) Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun hak dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut

- a. mendapatkan peserta yang telah memiliki kompetensi di bidang perencanaan sesuai dengan jenjangnya untuk Pelatihan Fungsional Perencana;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pelatihan dari Pusbindiklatren dan/atau pelaksana pelatihan.

Lampiran 4 : Surat Kesediaan Peserta  
Nomor : B-13451/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PESERTA PROGRAM PELATIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Golongan :.....  
Jabatan :.....  
Alamat Kantor :.....  
Telp :.....email resmi kantor (\*\*.go.id).....  
No Handphone :.....email pribadi (\*\*\*.com).....  
Pelatihan :.....  
Pelaksana Pelatihan :.....

Menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mengikuti Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023. Apabila saya **mengundurkan diri setelah batas waktu** yang ditetapkan dalam surat pemanggilan, saya bersedia mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren dalam pelaksanaan Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023.
2. Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Pusbindiklatren Bappenas dan Pelaksana Pelatihan, termasuk tidak melaksanakan pekerjaan rutin di kantor selama pelatihan berlangsung.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Pimpinan Instansi (Minimal Eselon II)

Yang Berjanji,

(Cap Basah stempel)

(Tanda tangan dan Meterai 10.000)

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

Lampiran 5 : Daftar Nama Peserta

Nomor : B-13451/P.01/DL.03.01/07/2023

Tanggal : 18 Juli 2023

### DAFTAR PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
1	Ade Handayani	199107222022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial	Kota Jakarta Selatan	DKI
2	Adnan Adi Setiawan Prayoga	199604172020121009	Kementerian Perdagangan	Inspektorat Jenderal	Kota Jakarta Pusat	DKI
3	Anhaerullah	199205172019031001	Pemerintah Kota Bima	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima	Kota Bima	NTB
4	Ari Sucihandika	199502092020121004	kementerian perhubungan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Kota Jakarta Pusat	DKI
5	Bayu Seno Aji	199612302020121006	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Tulungagung	JATIM
6	Betty Indah Puspitasari	199409102020122019	Kementerian Perdagangan	Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri	Kota Jakarta Pusat	DKI
7	Erwin Ramadhani	199402162022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Dit. Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan	Kota Jakarta Pusat	DKI
8	Fadli Akbar Pambudi	199105102022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Biro Humas, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan	Kota Jakarta Pusat	DKI

 **Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
9	Faisal Kamil Anwar	199412072022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statisti	Kota Jakarta Selatan	DKI
10	Firial Afra Raisa Mumtaz	200005122022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Jakarta Pusat	DKI
11	Goya Kala	198503252019031002	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kabupaten Aceh Timur	ACEH
12	Kusuma Maulisanti	199508112020122007	Kementerian Perhubungan	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros	SULSEL
13	Muhammad Ainurrofiq	198811072020121001	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	Bappeda	Kabupaten Bojonegoro	JATIM
14	Muhammad Ariq Rifqi Alfaisy	199707012022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Kelautan dan Perikanan	Kota Jakarta Pusat	DKI
15	Muhammad Brilliant Nugraha	199512172022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Kelautan dan Perikanan	Kota Jakarta Pusat	DKI
16	Musdalifah Burhan	198906142020122013	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Kota Jakarta Selatan	DKI
17	Nida Kamilia Khalda, S.Ab.	199304132019022007	Badan Siber dan Sandi Negara	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kota Depok	JABAR
18	Rara Sukma Palupi S.E	198709032019022005	Kementerian Sosial	Biro Hukum	Kota Jakarta Pusat	DKI
19	Rayinta Putri Kurniasanti, S.T.	199307042020122013	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Tulungagung	JATIM

 **Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN





NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
20	Reny Setyowati	199103132022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Jakarta Pusat	DKI
21	Rezza Perdana Al-hanif	199507122020121005	Pemerintah Kota Mojokerto	Bappeda Litbang	Kota Mojokerto	JATIM
22	Riyadh	199210262022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kota Jakarta Pusat	DKI
23	Syarifah Muslimat	199905052022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pengembangan UMKM dan Koperasi	Kota Jakarta Selatan	DKI
24	Tommy Setiawan, SE	198712232020121001	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kabupaten Luwu Timur	SULSEL
25	Usa Fakhri	199607042022021002	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Dit. P3IPN	Kota Jakarta Pusat	DKI

 **Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN

